

Bertani dan Bergerak: Studi Strategi Mobilisasi Gerakan GAPOKTAN Desa Klampok di Probolinggo

Alfian Fajar¹

Abstract: This research discusses the social movement initiated by farmers in Klampok Village, Probolinggo Regency. Social movements are actions that have a shared value, which forms a group, which is based on the same goal. This movement consisted of farmers from Klampok Village who massively aspired to their demands to obtain underpasses in the process of building the Pasuruan-Probolinggo toll road. The movement was established due to farmers' dissatisfaction with various parties both from the government, the private sector, security apparatus and non- governmental organizations. This study uses the theory of resource mobilization which states that movement occurs due to the emergence of dissatisfaction from the community, so it is quite possible to bring up a social movement. The movement of the peasant movement has the following flow, targeting sympathizers, recruiting volunteers, activating networks, and motivating to participate. These steps were passed well, so that the movement is consistent and lasts for a long time and can have strong endurance. Farmers use the mobilization strategy so that it is effective in generating movement.

Keywords: Farmers Movement, Mobilization Strategy, Collective, Demonstration.

Pendahuluan

Jalan tol adalah jalan bebas hambatan, yang hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih. Jalan tol bertujuan melancarkan mobilitas di daerah yang telah terhubung. Salah satu pembangunan jalan tol yang sedang dibangun oleh pemerintah yakni jalan tol Jakarta-Banyuwangi. Tol sebagai penghubung di setiap daerah meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Tol digunakan untuk distribusi barang dan jasa yang selanjutnya mempermudah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pembangunan jalan tol tersebut tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga menimbulkan kerugian. Dampak kerugian tersebut dirasakan terutama bagi mereka warga yang terkena dampak langsung dari pembangunan jalan tol ini. Khususnya warga Desa

¹ Staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, alfianfajar07@gmail.com

Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo yang mayoritas bekerja sebagai petani.

Tanah bagi petani bernilai sangat tinggi, karena tanah berguna sebagai mata pencaharian bagi petani. Bahkan petani juga menganggap tanah memiliki nilai religius-kosmis dan menganggap bahwa tanah memiliki nilai kepercayaan dan magis. Ada pula yang menganggap bahwa tanah bernilai secara ideologis. Akan tetapi petani tidak memperoleh kesejahteraan. Arah gerak kebijakan dalam bidang pertanian yang tidak konsisten dan kebijakannya dalam jangka pendek. Kebijakan pemerintah yang belum mengakomodir kepentingan mayoritas, membuat munculnya berbagai aksi represif di dalam lingkup masyarakat. Ketidakpuasan berakibat protes yang dilakukan masyarakat. Awal mula keresahan terjadi atas individu, namun kemudian semakin lama semakin banyak, yang kemudian dikelola sehingga dapat bertransformasi menjadi sebuah gerakan dengan tujuan yang sama.

Kerugian yang dirasakan oleh petani Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dari adanya pembangunan jalan tol Jakarta-Banyuwangi yakni terputusnya empat akses jalan menuju lahan sawah mereka. Seketika, jarak serta waktu tempuh yang singkat berubah menjadi jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama. Tidak hanya waktu, akibat dari jarak tempuh yang jauh ini juga memakan biaya yang sangat banyak. Dapat dikatakan petani rugi baik secara ekonomi maupun sosial. Berbagai cara dilakukan petani untuk memperoleh ganti jalan yang terputus. Unjuk rasa dilakukan oleh petani dengan melakukan aksi di kantor perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol tersebut, baik di kantor yang berada di Desa Klampok, maupun kantor cabang yang berada di Kecamatan Tongas. Aksi demonstrasi yang dilakukan petani Desa Klampok disorot berbagai pihak karena telah melakukan aksi demonstrasi dengan memblokir jalan hingga satu jam dan mengakibatkan kemacetan 4 km di jalan pantura Tongas.

Aksi demonstrasi tersebut berlangsung pada tanggal 12 Januari 2018. Ibu-ibu mendominasi gerakan ini dalam menuntut berbagai pihak termasuk pengembang tol agar dalam memperoleh *underpass*. Gerakan petani telah berlangsung 8 bulan dengan membangun tenda-tenda di sekitar proyek tol di Desa Klampok.

Berbagai mediasi dilakukan oleh gerakan petani dan pihak terkait tol Pasuruan- Probolinggo yaitu dengan pemerintah desa, pejabat pembuat komitmen, pihak swasta pengembang tol, muspika, pemerintah daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum telah bersinggungan dengan gerakan petani. Alasan dibalik tidak diterimanya tuntutan petani ini adalah tidak terpenuhinya persyaratan untuk membangun *underpass* yang minimal ketinggiannya adalah tujuh meter, sedangkan ketinggian yang memungkinkan ketinggian jalan tol di daerah Desa Klampok hanya lima meter. Pihak Pembuat Komitmen tidak menerima tuntutan petani karena tuntutan warga tidak akan terealisasi. Pihak Pembuat Komitmen awalnya telah memberikan opsi untuk mengganti jalan tersebut dengan pilihan *frontage* atau *underpass*, petani

lebih memilih *underpass*. Akan tetapi terjadi perselisihan antar kelompok tani, sehingga proses perumusannya dilakukan antar kelompok tani. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan gerakan petani yang menuntut *underpass* berbeda pilihan, akhirnya tidak ada keputusan apa pun.

Ketimpangan sosial yang terjadi serta ketidakadilan yang dirasakan oleh warga, khususnya mereka yang bekerja sebagai petani dapat berubah menjadi gerakan sosial. Oleh karena petani merasa mendapatkan dampak kerugian akibat pembangunan jalan tol ini, dengan tujuan yang sama, mereka berkumpul, untuk menyampaikan aspirasinya mengenai ketimpangan dan ketidakadilan yang didapat guna mewujudkan perubahan sosial. Gerakan sosial merupakan tindakan yang mempunyai nilai kebersamaan, yang diutarakan oleh beberapa orang yang membentuk suatu kelompok, yang didasari dengan tujuan yang sama, serta dalam komunikasi dan mediasi dalam prosesnya bersama dengan pemangku kebijakan, atau dengan pihak lawan (Tarrow, 1994 dalam Klandermans, 2005). Gerakan sosial dibagi menjadi dua tipe. Pertama adalah gerakan sosial umum, gerakan yang berdasarkan pada adanya perubahan nilai di masyarakat. yang kedua yakni gerakan sosial khusus, merupakan gerakan yang lebih fokus dalam hasil gerakan (Blumer dalam Sukamana, 2016).

Kinerja yang dilakukan oleh sebuah gerakan sosial digambarkan oleh teori mobilisasi sumber daya. Apa yang dimaksud dengan teori mobilisasi sumber daya adalah reaksi atas pandangan tradisional dari teori psikologi sosial tentang gerakan sosial (Klandermans, 2005). Teori ini lebih menitikberatkan pada proses gerakan sosial serta tingkat keberhasilan dari suatu gerakan. Klandermans berpendapat bahwa teori mobilisasi sumber daya fokus terhadap faktor struktural serta penekanan rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Ada dua jenis mobilisasi dalam kajian Klandermans, yakni mobilisasi konsensus dan mobilisasi aksi. Adapun yang dimaksud dengan mobilisasi konsensus adalah proses seorang penggerak dalam suatu organisasi gerakan untuk memperoleh dukungan dengan cara meyakinkan orang lain. Dalam hal ini, pengumpulan massa serta pengaruh sebagai tolak ukur dalam mobilisasi konsensus. Tipe yang kedua yakni mobilisasi aksi. Jika mobilisasi konsensus lebih menitikberatkan pada bagaimana penggerak organisasi dalam meyakinkan orang lain agar terlibat dalam suatu organisasi gerakan, mobilisasi aksi fokus terhadap usaha untuk menguatkan dan membangkitkan orang lain untuk turut serta terlibat dalam suatu gerakan sosial. Mobilisasi aksi lebih menyita banyak waktu, materi serta keterampilan. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari mobilisasi aksi adalah mengubah simpatisan menjadi partisipan aktif (Klandermans, 2005).

Jenis gerakan sosial beraneka ragam. Mulai dari gerakan sosial mahasiswa, gerakan petani, gerakan ideologi hingga gerakan radikal. Dalam suatu gerakan sosial diharapkan mampu memberikan perubahan sosial. Namun, dalam suatu gerakan sosial, di dalamnya terkadang tidak terlepas dari unsur politik. Harper berpendapat, yang dimaksud dengan

gerakan sosial adalah gerakan yang terdiri dari beberapa orang yang menginginkan adanya suatu perubahan dan merupakan alat atau media bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi atau permintaan mereka kepada pemerintah (Sukmana, 2016). Gerakan politik merupakan gerakan yang didasarkan pada sudut pandang yang sama tentang politik dan mempunyai tujuan yang sama pula. Gerakan politik berbeda dengan partai politik. Gerakan politik terdiri dari banyak orang yang berkumpul membentuk suatu kelompok gerakan sosial, dan menghasilkan aksi atau demonstrasi hingga tindakan sosial berdasarkan keyakinan yang terbentuk berdasarkan keyakinan politik.

Dalam penelitian sebelumnya Sufyan (2015), gerakan sosial yang terjadi di pegunungan Kendeng Utara didasari oleh kebijakan pabrik semen yang menimbulkan rasa cemburu dalam masyarakat. Ada aspek kontingensi yang memunculkan gerakan sosial. Gerakan di Kabupaten Pati menularkan sikap penolakan yang terjadi di Kabupaten Rembang karena adanya aktor gerakan yang ikut dalam kasus di Kabupaten Rembang. Gerakan sosial masyarakat yang terjadi di Kendeng Utara bersifat separatis. Relawan yang ikut dalam gerakan sosial ini bersifat separatis dengan motivasi “senasib-sepenanggungan” sehingga masyarakat sipil terhimpun untuk melawan penetrasi kapital.

Salah satu upaya gerakan sosial masyarakat ini yaitu melakukan aksi pemblokiran pabrik semen. Gerakan sosial masyarakat tidak sendirian, ada pihak kontra terhadap pabrik semen membuat gerakan yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk memperoleh tujuannya. Akan tetapi pengaruh pihak ketiga yang pro terhadap pabrik semen menggerus aktor gerakan kontra pabrik semen sehingga relawannya semakin berkurang. Akhirnya gerakan sosial tidak memperoleh tujuan yang menjadi motif awal gerakan ini terbentuk. Sama dengan halnya gerakan petani dengan motivasi sesama petani merasakan senasib sepenanggungan sehingga secara terhimpun untuk menuntut memperoleh *underpass*.

Gerakan perlawanan petani erat kaitannya dengan gerakan sosial dan tidak jarang gerakan petani tersebut berdampak politik. Blumer memberikan penjelasan mengenai gerakan sosial yakni bahwa pergerakan sosial ditandai dengan rasa kegelisahan dari setiap individu karena merasa tidak puas akan sesuatu, serta adanya keinginan untuk meraih suatu tatanan yang baru secara bersama-sama (Sukmana, 2016). Kemudian Landsberger memberikan penjelasan bahwa gerakan petani menggunakan empat dimensi yaitu pada tingkat pertama adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Kemudian pada tingkat kedua, dimana aksi bersifat kolektif. Pada tingkat ketiga, dimana aksi bersifat instrumental. Dan pada tingkat keempat, dimana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial.

Suharko (2006) memaparkan tentang gerakan petani di Indonesia dengan konsep dan karakter gerakan sosial baru. Pertama, melihat sudut pandang historis, gerakan petani telah melalui berbagai perubahan politik sehingga menyediakan kesempatan ruang publik yang luas untuk

memperkuat gerakan petani. Pengaruh demokrasi menjadikan gerakan petani berani mengaspirasikan pendapat atas hak-hak dan tujuan kolektifnya. Kedua, gerakan petani menuntut atas hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan yang menguasai tanah publik sehingga berimbas kepada petani terbatas bukan tertutup. Seringnya terjadi sengketa antar petani dan perusahaan menjadi permasalahan rumit sehingga memunculkan aksi kolektif. Ketiga, pengaruh aktor lokal dalam mengadvokasi gerakan petani menjadi sumber dukungan dan juga pembela dari tujuan kolektif petani yang terjadi di Batang dan Pekalongan.

Keempat, Pengorganisasian gerakan petani membuat serikat petani dipilih berdasarkan politik akar rumput dengan dibentuk melalui jaringan yang relatif longgar tidak pakem dengan adanya hierarki organisasi. Kelima, taktik yang digunakan di luar politik formal karena tidak berhubungan dengan jabatan politik formal. Keenam secara ideologis gerakan petani berdiri atas respons tendensi menguatnya pasar (kapitalisme) yang erat dengan institusi negara. Sehingga tujuan kolektif untuk menentang bentuk dari kapitalistik. Ketujuh, dukungan dari berbagai latar belakang selain petani memperkuat gerakan, kontribusi yang dilakukan dalam pembingkai isu dan proses pengorganisasian. Sama dengan penelitian gerakan petani yang mengobjekkan petani membuat gerakan berdasarkan permasalahan, ketidakadilan, dan ketidakpuasan memunculkan aksi kolektif.

Sari (2017) juga menjelaskan mengenai teori mobilisasi sumber daya menurut McCarthy dan Zald bahwa kondisi-kondisi yang dapat mendukung perubahan nilai ke dalam tindakan nyata, serta terkait dengan bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada dalam sebuah gerakan. Teori ini membagi tiga aspek agar mempermudah gerakan sosial, yakni aspek dukungan, strategi, pendekatan dan relasi dengan masyarakat luas. Sehingga dapat melihat proses gerakan sosial dalam penelitiannya di Desa Lakardowo yang melakukan gerakan sosial atas lingkungan hidup agar tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) tidak berdampak bagi lingkungannya. Gerakan sosial ini didasari atas penimbunan limbah B3 yang dilakukan secara ilegal oleh salah satu perusahaan hingga menimbulkan pencemaran air bagi warga Desa Lakardowo. Strategi yang dilakukan gerakan sosial menguatkan internal, melakukan pemetaan aktor, membentuk pengaduan pengaruh penimbunan limbah B3, dan mensosialisasikan tentang limbah B3. Sama halnya dengan penelitian gerakan petani yang didasari dengan strategi penguatan internal, pengaruh tokoh desa, dan narasi yang dibangun dalam memperoleh *underpass*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk melihat dan mengetahui bagaimanakah peran petani dalam menuntut pengembang tol PASPRO untuk diberikan akses jalan yang tertutup. Kemudian data yang diperoleh

dari lapangan melalui wawancara dan observasi dikumpulkan, dikelompokkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan peneliti.

Pembahasan

Latar Belakang dan Tujuan Gerakan Petani

Berdasarkan keterangan ketua gerakan petani di Desa Klampok, awal mula terbentuknya gerakan tani ini berasal dari Kepala Desa yang menyuruh lakukan warga Desa Klampok, khususnya para petani, buruh tani dan peternak yang terkena dampak langsung dari pembangunan tol untuk berunjuk rasa atas dasar ditutupnya empat jalan akses menuju sawah mereka. Unjuk rasa dilakukan kepada PT. Waskita Karya yang berlokasi di daerah Desa Klampok juga. Hal ini bertujuan untuk meminta *underpass* sebagai pengganti empat jalan akses yang ditutup oleh PT. Waskita Karya dalam hal pembangunan jalan tol. Kemudian mereka yang berdemonstrasi membentuk suatu gerakan tani, dengan struktur organisasi yang masih sederhana, hanya ketua gerakan, administratif, koordinator lapangan aksi, dan anggota gerakan. Masing-masing menjalankan gerakan tani ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Empat akses jalan menuju sawah para petani ini berupa jalan setapak, yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan beroda dua. Jarak tempuh dari rumah para petani, buruh tani, maupun peternak ke sawah mereka jika melalui jalan setapak hanya memerlukan waktu yang singkat sebab jarak tempuh sangat pendek. Namun, akibat adanya pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo (PASPRO) atas keempat akses jalan warga, jalan menuju ke sawah tersebut ditutup. Tol PASPRO merupakan jalan yang dibangun di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sama dengan jalan tol lainnya, jalan tol hanya boleh dilewati oleh kendaraan minimal beroda empat. Seperti mobil, bus, dan truk. Karena jalan tol tidak boleh dilewati oleh kendaraan beroda dua maupun pejalan kaki, serta adanya pembangunan jalan tol ini menutup empat akses jalan ke sawah milik para petani, para petani yang notabenenya hanya memiliki kendaraan roda dua merasa sangat dirugikan. Karena mereka harus mencari akses jalan lainnya yang cukup panjang dan memakan waktu serta biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu, muncul rasa senasib dan sepenanggungan para petani, buruh petani dan peternak yang kemudian berkumpul menjadi satu membentuk sebuah kelompok lalu melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa yang didasari atas perintah Kepala Desa.

Kepala Desa merupakan orang yang memimpin sebuah desa. Selayaknya pemimpin, ia harus bersikap adil. Ketika menangani permasalahan warga desanya, seorang kepala desa harus dapat memosisikan sikapnya mendukung warganya atau tidak. Berdasarkan salah satu narasumber, menjelaskan bahwa awal desas-desus akan dibangunnya jalan tol dibenarkan oleh kepala desa. Kemudian karena warga merasa dirugikan, kepala desa menyuruh warganya untuk berunjuk rasa ke pengembang jalan tol, PT Waskita Karya. Warga yang melakukan

unjuk rasa meminta agar dibuatkan jalan yang disebut dengan *underpass*, sebagai pengganti empat akses jalan menuju sawah mereka yang tertutup akibat pembangunan jalan tol PASPRO. Unjuk rasa tersebut membuahkan hasil berupa mediasi, yang mana tuntutan dapat terpenuhi apabila warga yang berunjuk rasa menyerahkan proposal pembangunan jalan *underpass*.

Keinginan para petani untuk membangun *underpass* sangat tinggi. Hal ini dikarenakan mereka merasa dirugikan dengan adanya jalan tol PASPRO, sehingga mereka menuntut penggantinya berupa jalan tembus atau yang biasa disebut dengan *underpass*. Dari hasil mediasi pertama dengan PT. Waskita Karya pada unjuk rasa menghasilkan pembangunan *underpass* akan dilaksanakan apabila para pengunjuk rasa mengajukan proposal. Namun pada kenyataannya setelah warga memberikan proposal, jalan tembusan atau *underpass* tak kunjung terealisasi. Hingga tim pengkaji PPK datang, dan memberikan dua opsi yakni jalan melingkar (*frontage*) dan jalan tembus (*underpass*). Warga Desa Klampok menolak pembangunan jalan melingkar dan lebih memilih jalan tembus. Alasan warga menolak *frontage* adalah jarak tempuh yang dilalui warga melaluinya lebih panjang daripada *underpass*. Apabila jarak tempuh ke sawah terlalu jauh akan merugikan warga, terutama dari segi tenaga, karena banyak dari mereka yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan beroda dua.

Gerakan kelompok tani di Desa Klampok ini diberi nama GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dengan diketuai oleh Timbul. Sama halnya dengan kelompok tani kebanyakan, GAPOKTAN memiliki tujuan berbagi wawasan tentang bertani, kesamaan atas dasar tradisi, meningkatkan keakraban, dan lain-lain. Namun, sebuah gerakan tidak selalu berjalan mulus. Perselisihan yang terjadi di GAPOKTAN adalah perselisihan mengenai perumusan *underpass* atau *frontage*. Sebagian memilih *frontage* dan sementara lainnya memilih *underpass*. Karena timbul perselisihan di dalam kelompok tani, malam harinya masyarakat berkumpul di rumah Timbul. Dari pertemuan itu menghasilkan keputusan warga yaitu menghendaki adanya *underpass*. Keputusan tersebut disampaikan oleh ketua GAPOKTAN kepada PT. Waskita Karya, yang kemudian hasilnya akan diberitahukan secepatnya. Namun, warga mendengar adanya pertemuan antara ketua GAPOKTAN, kepala desa, dan warga yang memutuskan setuju dengan adanya jalan memutar atau *frontage*, bukan jalan tembus atau *underpass*. Mendengar hal itu, warga yang memiliki lahan pertanian di utara jalan merasa tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya, keputusan sepihak tersebut mendapat reaksi yang keras dari anggota gerakan.

Keresahan warga yang ingin mendapatkan jalan pengganti, membuat mereka mendirikan gerakan tani yang diinisiasi oleh beberapa orang dari RW 1 dan RW 2. Para petani saling membujuk satu sama lain untuk melakukan aksi pertamanya di kantor PT. Waskita Karya. Selain itu mereka juga turut mengajak sanak saudaranya. Awal berdirinya gerakan tani hingga mereka melakukan aksi pertamanya, tentu kepala desa juga turut mendukung gerakan tersebut. Menurut Klandermans, sebuah

gerakan dimulai dari mencari target simpatisan, kemudian merekrut relawan, dan mengaktifkan jaringan serta memberikan motivasi untuk turut berpartisipasi. Gerakan petani di Desa Klampok ini telah mencapai tahap-tahap yang telah dijelaskan oleh Klandermans.

Gerakan tani di Desa Klampok ini cepat berkembang pesat. Hal ini dikarenakan setiap malam Jumat, ada tahlilan yang dijadikan sarana aksi demonstrasi. Kode yang digunakan untuk menyerukan akan diadakannya aksi adalah kentongan. apabila kentongan berbunyi maka itu sebagai tanda bahwa akan ada aksi. Untuk memperkuat gerakan tani, warga membangun tenda atau pos untuk berjaga-jaga di sekitar proyek. Warga bergiliran menjaga pos guna apabila terdapat pelaksanaan pembangunan tol tanpa memikirkan tuntutan warga Desa Klampok, maka warga yang sedang berjaga-jaga di pos akan membunyikan kentongan untuk mengumpulkan warga dan melakukan aksi. Hingga pada akhirnya tenda pos dibongkar oleh warga sendiri karena akan menempuh jalan mediasi lebih lanjut agar mendapatkan solusi terbaik. Karena tidak kunjung direalisasikannya permintaan warga mengenai *underpass*, terjadi mobilisasi warga Desa Klampok yang terdampak tol untuk mengikuti aksi kembali pada Jumat pagi, tanggal 12 Januari 2018 di kantor PT. Waskita di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas. Kabupaten Probolinggo.

Strategi Gerakan Mobilisasi Gerakan Petani

Dalam suatu gerakan perlu adanya strategi dan taktik agar suatu gerakan tersebut berjalan lebih terarah dan dapat mencapai tujuan bersama. Begitu pula dengan gerakan tani di Desa Klampok ini. Agar gerakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan aspirasi dapat didengar baik oleh pengembang tol maupun pemerintah daerah, maka gerakan tani harus memiliki strategi serta taktik khusus. Adapun proses strategi dan taktik gerakan petani ini yakni mulai dari rapat gerakan. Masyarakat mengadakan rapat koordinasi gerakan yang diadakan setiap hari Jumat setelah salat Jumat selesai. Rapat gerakan diawali dengan istighosah. Dengan semangat warga melantunkan asma Allah. Rapat tersebut membahas terkait keinginan warga memperoleh *underpass*. Cara ini dilakukan agar apa yang mereka inginkan dapat terkabul. Rapat yang diadakan oleh warga dijaga oleh aparat keamanan, sehingga memang rapat tersebut atas sepengetahuan polisi. Spanduk-spanduk pun mereka pasang di sekitar pos tenda.

Hal berikutnya yang dilakukan oleh gerakan tersebut yakni melakukan pembagian tugas dalam gerakan. Pembagian tugas ini bertujuan agar peran-peran tiap warga dalam setiap aksi demonstrasi dapat sesuai dengan fungsinya. Selain itu, gerakan dapat terkelola dengan baik. Adapun pembagian tugas misalkan bagian administrasi bertugas untuk mengarsipkan dan surat-menyurat, korlap bertugas menjaga keberlangsungan aksi.

Gerakan tani dalam melakukan perlawanan menuntut haknya, mereka merasa bahwa memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

menyebutkan, "Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik." Telah dijelaskan bahwa pembangunan jalan tol juga harus memperhatikan jalan yang ada agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Karena gerakan tani merasa memiliki dasar hukum yang kuat, sejak bulan Mei hingga Januari mereka menuntut haknya untuk memperoleh *underpass*. Selama aksi berlangsung dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan berjalan tertib. Namun, ada oknum yang membuat kerusakan seperti melempar batu. Karena hal tersebut, banyak media yang meliput.

Perlawanan terus berlangsung meskipun berbagai cara mediasi telah dilayangkan oleh beberapa pihak. Namun tetap dalam proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan antara warga dengan pihak pembangunan tol. Ombudsman ikut turun tangan untuk membantu mediasi. Namun kehadiran Ombudsman ke lokasi tidak bersama dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Kemudian warga menemui anggota Ombudsman di tempat penginapan. Mereka mengadakan mediasi dengan pemerintah daerah, kepala desa dan Camat Tongas. Awal mediasi, Ombudsman mendukung warga. Akan tetapi pada saat gelar perkara terdapat dua kubu dari pihak Ombudsman. Salah satu kubu ada yang lebih condong ke pihak PT. Waskita Karya. Tak hanya itu, gerakan tani juga mengirim surat terhadap DPR RI Komisi V yang bertugas di bidang infrastruktur dan perhubungan serta DPR RI Komisi VI yang bertugas di bidang industri investasi dan persaingan usaha. Berbagai cara ditempuh oleh gerakan tani Desa Klampok semata-mata hanya karena mereka menginginkan adanya jalan *underpass* sebagai ganti empat akses jalan menuju ke sawah.

Bert Klandermans, menurutnya teori mobilisasi sumber daya menekankan pada faktor struktural seperti ketersediaan sumber daya yang diberikan untuk kolektif atau individu dalam suatu jaringan sosial, seperti uang, pekerjaan, perlindungan dan sebagainya serta menekankan pada rasionalitas dalam berpartisipasi (Sukmana, 2016). Menurut beberapa peneliti, adanya sumber daya mempengaruhi kuat tidaknya suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya di antaranya pemimpin, keuangan, anggota dan simpatisan, dan lain-lain. Kebutuhan sumber daya tentunya didasari pada cukup tidaknya sumber dana yang merupakan kebutuhan sentral dalam suatu gerakan. Dalam gerakan tani di Desa Klampok, sumber dana didapat dari donasi sukarela warga. Tidak ada penyandang dana tetap. Tak hanya sumber dana, kebutuhan makanan juga sumbangan dari warga. Warga saling bahu-membahu secara sukarela dan membantu satu sama lain.

Warga yang merasa senasib dan sepenanggungan menyebabkan timbulnya solidaritas yang kemudian berinisiatif membentuk suatu kelompok untuk menyampaikan aspirasi. Menurut Klandermans (2005), mobilisasi konsensus dikatakan berhasil apabila mendapat dukungan yang potensial. Artinya, simpatisan sangat dibutuhkan dalam sebuah gerakan. Hal ini dapat memberikan gejolak dalam gerakan. Dalam

gerakan tani di Desa Klampok jumlah anggota simpatisan sebanyak 675 orang. Sedangkan aksi demonstrasi di kantor PT. Waskita Karya kurang lebih sekitar 400 orang turut berpartisipasi.

Tidak hanya melalui aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi, melalui media massa juga menjadi salah satu cara untuk menyalurkannya. Ketika gerakan tani Desa Klampok melakukan aksi demonstrasi, tak sedikit media massa yang meliputnya. Tentu warga menyambut dengan baik, karena dengan cara diliput menjadi penyampaian informasi secara luas baik kepada masyarakat maupun pihak yang terkait dengan pembangunan tol.

Hasil Gerakan

Locher berpendapat bahwa ada lima faktor yang menjadi karakteristik agar terpenuhinya suatu keberhasilan gerakan yaitu, yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan, seorang pemimpin menurut Locher harus mampu memusatkan perhatian kepada tugas-tugas yang diperlukan agar dapat mencapai tujuan gerakan (Sukmana, 2016). Dalam gerakan petani Desa Klampok ini mengalami beberapa hambatan. Hal ini dikarenakan juru runding etika itu sedang sakit. Kedua, citra publik positif kelompok dan pemimpinnya harus positif agar mudah mendapat dukungan keyakinan publik tentang gerakan tersebut yang bersifat mulia (Sukmana, 2016). Ketiga, taktik dalam suatu gerakan sangat diperlukan, agar gerakan tersebut dapat mencapai tujuan. Keempat, tujuan, dalam hal ini, suatu gerakan harus mampu meyakinkan pihak luar agar apa yang menjadi tujuan dari suatu gerakan tersebut dapat tercapai. Namun, gerakan tani di Desa Klampok tidak mampu untuk meyakinkan pihak luar mengenai tujuan mereka yakni pembuatan *underpass*. Hasil dari kesepakatan antara warga dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol adalah diberikannya jalan memutar atau *frontage*. Karena dirasa *underpass* kurang layak, sebab jalan tersebut bukan jalan produktif. Melainkan hanya jalan yang dijadikan jalan pintas dari rumah ke lahan sawah. Terakhir adalah dukungan yang sangat diperlukan agar gerakan dapat berhasil. Gerakan tani desa Klampok sangat didukung oleh para sesepuh di Desa Klampok. Dukungan ini memberikan dampak eksistensi yang sangat besar bagi gerakan tani itu sendiri. Sehingga gerakan tani mudah mendapat dukungan politik dan finansial.

Hasil kesepakatan bersama berbagai pihak, jalan melingkar atau *frontage* dijadikan solusi. Berdasarkan pertimbangan, *frontage* dijadikan solusi karena dianggap lebih efisien untuk dilalui jika lahan mengalami panen. Karena *frontage* dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat, tentu hal ini dapat memudahkan petani yang panen untuk mengangkut hasil panennya. *Underpass* dirasa tidak memenuhi beberapa kriteria jika dibangun mulai dari ketinggian minimal tujuh meter untuk membangun *underpass* tidak bisa terpenuhi, ketentuan jalan daerah minimal dua meter yang dimiliki hanya satu setengah meter, dan hal-hal teknis lainnya yang tidak mendukung keberadaan *underpass* di Desa Klampok. Namun, setelah beberapa waktu jalan *frontage* terbangun, dampak yang terjadi

bagi petani terutama yang berusia lanjut atau paruh baya membuat jalan yang dilalui bertambah jauh karena harus jalannya yang memutar. Kebanyakan petani dan peternak menuju ke lahan pertaniannya berjalan kaki, sehingga menambah beban bagi petani baik secara ekonomi, tenaga, dan sosial. Jalan *frontage* dapat dilihat jika petani yang memiliki kendaraan saja untuk mempermudah pekerjaannya, sedangkan beberapa warga yang paruh baya tidak bisa menggunakan kendaraan, dan juga bagi pemilik kendaraan meningkatkan biaya untuk membeli bahan bakar bagi kendaraannya menuju lahan pertaniannya.

Kesimpulan

Gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang didasari oleh kepentingan bersama atas tujuan untuk mengubah yang tidak sesuai secara kolektif untuk mencapai tujuan yang ingin diperoleh. Gerakan sosial terjadi akibat penindasan dan penderitaan yang mengubah tatanan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ada beberapa hal yang memunculkan gerakan petani di Desa Klampok yaitu tol Pasuruan-Probolinggo yang memutus jalan dari rumah warga menuju lahan pertaniannya. Empat jalur penghubung antara rumah warga dengan lahan pertanian digunakan sebagai jalan bagi petani untuk bercocok tanam dan beternak terputus akibat proyek tol. Selanjutnya munculnya gerakan petani atas pengaruh dari kepala desa yang ikut mendukung aksi demonstrasi pertama yang dilakukan gerakan petani. Tentunya aksi demonstrasi tersebut didasari oleh tujuan awal, dalam proses pembentukan gerakan, agar petani memperoleh *underpass* sangat besar, penawaran dari tim pengkaji dari pejabat pembuat komitmen memberikan dua opsi kepada warga yaitu jalan *frontage* atau *underpass*, akan tetapi petani memilih untuk menuntut adanya *underpass*. Dua opsi tersebut menimbulkan perselisihan antara kelompok tani untuk merumuskan jalan penghubung rumah warga dengan lahan pertanian. Berdirinya gerakan petani telah memenuhi kriteria runtutan mengubah simpatisan yang telah dimiliki menjadi partisipan dalam pandangan Klandermans, yaitu menargetkan simpatisan, merekrut relawan, mengaktifkan jaringan, dan memotivasi untuk berpartisipasi.

Gerakan petani membutuhkan strategi untuk mengumpulkan massa dan menyampaikan aspirasinya untuk mencapai tujuan. Dalam membagi tugas gerakan, rapat gerakan dilakukan gerakan petani agar alur gerakan berjalan dengan jelas dan terstruktur. Rapat gerakan petani biasanya dilakukan pada tiap hari Jumat sekaligus pengajian. Agar gerakan petani berjalan terstruktur, dilakukan pembagian tugas, seperti pembagian tugas yang dilakukan oleh ketua gerakan, tim administratif untuk pengarsipan dan dokumentasi, koordinator lapangan untuk menjaga keberlangsungan berjalannya aksi demonstrasi, dan relawan serta simpatisan sebagai massa yang membantu memperkuat gerakan. Tuntutan yang dilakukan gerakan petani ini didasari atas peraturan perundangan, bahwa ketika pembangunan tol berlokasi di atas jalan, jalan tersebut harus tetap berfungsi dengan baik. Gerakan petani dalam memperoleh tujuannya telah melakukan mediasi dengan berbagai pihak, yakni pemerintah, pihak

swasta, lembaga hukum dan lembaga yang terkait dengan tol lainnya akan tetapi tidak memperoleh hasil yang diinginkan gerakan. Dalam proses tuntutan gerakan petani membutuhkan sumber daya untuk memperkuat seperti pemimpin, keuangan, simpatisan dan relawan, serta akses media untuk memperkuat daya tahan gerakan.

Keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat atas empat faktor: kepemimpinan, citra positif, taktik yang diterima secara sosial dan tujuan yang dapat diterima secara sosial. Kepemimpinan dalam gerakan petani mengalami ketidakjelasan tugas bagi simpatisan dan relawan ketika ketua gerakan sakit. Selanjutnya citra positif yang terbangun yaitu menghimpun petani yang terdampak langsung tol untuk menyatukan mereka agar dapat ikut dalam gerakan tuntutan *underpass* ini. Setelah itu dalam memobilisasi massa, gerakan petani menggunakan taktik ketika masyarakat berkumpul narasi yang dibangun bahwa kehadiran tol akan berdampak atas lahan pertanian di sekitar, sehingga petani yang merasa memiliki keresahan yang sama bertindak untuk aksi demonstrasi. Selanjutnya tujuan yang sama yaitu memperoleh *underpass* menjadi motivasi gerakan petani memperjuangkan tuntutannya. Tujuan tersebut didukung oleh tokoh masyarakat sehingga eksistensi gerakan petani cukup kuat. Namun, tujuan yang diinginkan gerakan petani yaitu *underpass* tidak terkabulkan, bahwa berbagai pihak tidak menyepakati adanya *underpass* dan lebih memilih jalan *frontage*. Dipilihnya jalan *frontage* bertujuan untuk mempermudah mobilitas petani menuju lahan pertaniannya, berbagai kendaraan dapat digunakan menuju lahan pertanian sehingga mempermudah petani untuk panen hasil yang telah ditanam. Akan tetapi kehadiran *frontage* membuat petani yang biasanya jalan kaki menuju sawahnya berjalan berkilo-kilo meter karena jalan yang memutar, tentunya hal tersebut membuat estimasi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan cukup banyak.

Artinya, gerakan petani dalam melakukan strategi mobilisasi hingga gerakan kurang lebih tujuh bulan memperjuangkan tujuannya dapat dikatakan berhasil. Gerakan petani melakukan perlawanan untuk memperoleh *underpass* sumber daya yang dimiliki cukup kuat sehingga daya tahan gerakan berlangsung masif. Tentunya gerakan petani juga membutuhkan penyesuaian dengan wilayah, masyarakat, dan tuntutannya. Mayoritas pekerjaan di Desa Klampok membuat gerakan ini memperoleh perhatian lebih dari masyarakat sehingga banyaknya simpatisan dan relawan yang mendukung. Akan tetapi tujuan yang inginkan gerakan petani tidak diperoleh, kurangnya meyakinkan berbagai pihak terkait tol membuat tidak maksimalnya untuk memperoleh *underpass*, sehingga terbangun *frontage* yang sebenarnya tidak diinginkan oleh gerakan petani.

Daftar Pustaka

Klandermans, Bert. 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lofland, John. 2003. *Protes: Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sari, Dewi Kartika. 2017. "Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Politik Indonesia* 2(1).
- Sufyan, Ahmad. 2015. "Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang." Skripsi. FISIP. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Sunarko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.1, No. 2. Juli 2006.